

# Komunikasi Politik dan Pemilu 2024: Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Menuju Pemilu yang Bermartabat

Tasrif<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mbojo Bima, Indonesia; tasrifbima6477@gmail.com

---

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Komunikasi Politik;  
Pemerintah Daerah;  
Pemilu Bermartabat.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memastikan pemilu yang bermartabat adalah langkah yang tak terhindarkan dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggabungkan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Adapun Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara, observasi Partisipatif kemudian Analisis Dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Bima harus mengakui peran krusial komunikasi politik dalam Pemilu 2024 dan berusaha untuk menerapkannya secara efektif. Dengan menggabungkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendidikan politik, pemilu di Kabupaten Bima dapat berjalan dengan integritas dan memberikan hasil yang mewakili keinginan rakyat. Selain itu Pemerintah juga berperan sentral dalam dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, meningkatkan partisipasi masyarakat, menyediakan informasi yang jelas, menjaga keamanan, dan mempromosikan etika pemilu, dan memastikan bahwa Pemilu 2024 di Kabupaten Bima berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

## Korespondensi:

Tasrif

Universitas Mbojo Bima, Indonesia; tasrifbima6477@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Komunikasi politik dan pemilihan umum merupakan dua elemen yang tak terpisahkan dalam dinamika demokrasi sebuah negara (Ningtyas, 2021). Setiap pemilihan umum adalah momen penting di mana warga negara memiliki kesempatan untuk menyuarakan hak politik mereka (Arrofi, 2023). Pemilu 2024, yang akan datang, di Indonesia adalah salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi negara ini (Aris, 2022). Kabupaten Bima, sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan sumber daya alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat, turut merayakan dan merasakan dampak signifikan dari proses pemilihan ini (Kadir, 2021). Dalam konteks ini, komunikasi politik memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk opini publik, menggalang dukungan, dan memastikan pemilu berjalan dengan semestinya (Micoland Manullang & Sigit Widiarto, 2022).

Pemerintah daerah Kabupaten Bima, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di wilayahnya, memiliki tugas berat untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik, adil, dan bermartabat (Kadir, 2021). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini akan memengaruhi persepsi warga Bima terhadap integritas pemilu dan sistem politik secara keseluruhan (Saputra, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi politik yang efektif

untuk menginformasikan, melibatkan, dan membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu 2024 (Candra & Bariun, 2022).

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal (Dimansyah Arianto, 2021). Mereka harus memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan adil di wilayah mereka (Saputra, 2020). Pemberian informasi yang jelas, aksesibilitas terhadap data pemilu, dan transparansi dalam pengambilan keputusan adalah faktor-faktor kunci dalam menciptakan pemilu yang bermartabat (Candra & Bariun, 2022). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan ini (Sutrisno, 2019).

Pada era informasi yang begitu cepat dan mudah diakses, komunikasi politik tidak lagi hanya masalah kampanye fisik (Rahmansyah & Irwandi, 2021). Pesan-pesan politik kini dapat menyebar melalui berbagai platform media sosial dan saluran komunikasi digital (Arianti, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat. Upaya ini akan membantu menciptakan pemilu yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif (Vanly Vily Mumu, 2021).

Kemudian masalah disinformasi dan hoaks dapat mengganggu proses pemilu dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik (Rifky Setya Anugrah et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi penyebaran informasi palsu dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke sumber informasi yang terpercaya (Dimansyah Arianto, 2021). Selain itu, ketidaksetaraan akses ke media dan literasi politik yang rendah juga bisa menjadi hambatan (S, 2023). Pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan literasi politik di antara warga Kabupaten Bima, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan informasi dalam pemilu (Duto, 2023).

Selain itu tidak hanya faktor teknologi, melainkan juga aspek sosial dan budaya yang perlu dipertimbangkan dalam konteks Kabupaten Bima (Nusantara, 2020). Daerah ini memiliki beragam kelompok etnis, tradisi, dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi politik yang efektif harus dapat mencerminkan keanekaragaman ini dan memastikan bahwa seluruh warga Bima merasa didengar dan diwakili dalam proses pemilu.

Dalam kerangka inilah makalah ini akan membahas peran komunikasi politik dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima menuju pemilu yang bermartabat pada tahun 2024. Kami akan mengulas bagaimana strategi komunikasi politik yang cermat dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat, memastikan partisipasi yang aktif, dan merangsang diskusi yang produktif selama proses pemilihan umum mendatang. Selain itu, kami juga akan menyelidiki tantangan yang mungkin dihadapi dan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam konteks Kabupaten Bima.

Dengan memahami pentingnya komunikasi politik dalam pemilu, kita dapat lebih baik memahami bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memastikan pemilu yang bermartabat adalah langkah yang tak terhindarkan dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

## 2. METODE

Jenis Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggabungkan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan secara rinci komunikasi politik dalam konteks pemilu 2024 di Kabupaten Bima, sementara pendekatan eksploratif akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik di

wilayah ini. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bima, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten Bima dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevansinya dalam konteks pemilu 2024 dan keragaman budaya serta geografisnya yang menarik.

Adapun teknik pengumpulan data seperti Wawancara dimana peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, calon pemilihan, aktivis politik, dan warga masyarakat. Wawancara akan menjadi sumber utama informasi tentang strategi komunikasi politik yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan harapan masyarakat. Kemudian selanjutnya melalui observasi Partisipatif: Peneliti akan turut serta dalam beberapa kegiatan kampanye politik, pertemuan warga, dan forum diskusi untuk mengamati secara langsung interaksi komunikasi politik yang terjadi. Observasi ini akan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika komunikasi politik di lapangan. Analisis Dokumen: Kami akan menganalisis dokumen-dokumen terkait pemilu, kebijakan komunikasi, laporan publik, dan media massa untuk memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis data penelitian: Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data akan melibatkan langkah-langkah seperti Transkripsi, Kategorisasi, Analisis Tekstual, Perbandingan dan Kontrastasi. Hasil analisis akan diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi komunikasi politik di Kabupaten Bima.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peran Komunikasi Politik dalam Pemilu 2024**

Komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu (Saputra, 2020); (Liando, 2016). Pertama, melalui komunikasi politik, para pemimpin dan partai politik dapat mengenalkan diri, program-program politik, dan visi-misi mereka kepada masyarakat (Candra & Bariun, 2022). Ini membantu masyarakat dalam memahami pilihan yang mereka miliki (Fatimah, 2018). Kedua, komunikasi politik juga digunakan untuk membangun citra positif dari kandidat atau partai politik tertentu (Rosidi, 2017). Ketiga, komunikasi politik dapat digunakan untuk menggalang dukungan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu (Alfiyani, 2018). Adapun peran komunikasi politik tersebut adalah:

- a. Membangun kesadaran politik masyarakat. Komunikasi politik memainkan peran penting dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat (Wulandari & Widiarti, 2020). Melalui informasi dan diskusi politik yang disampaikan oleh pemimpin dan partai politik, masyarakat dapat lebih memahami isu-isu politik yang relevan. Ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional ketika memilih kandidat atau partai politik dalam pemilu. Dengan pemahaman politik yang lebih baik, masyarakat lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses pemilu (Susanto, 2013).
- b. Mendorong partisipasi pemilih. Komunikasi politik efektif juga dapat mendorong partisipasi pemilih. Melalui pesan-pesan yang meyakinkan dan menginspirasi, pemilih dapat merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk menggunakan hak suaranya. Partisipasi yang tinggi dalam pemilu merupakan indikator kesehatan demokrasi dan penting untuk mendapatkan hasil pemilu yang representatif (Anshari, 2013).
- c. Mengatasi isu-isu sensitif. Dalam setiap pemilu, terdapat isu-isu yang sangat sensitif dan kontroversial. Komunikasi politik yang baik dapat membantu mengatasi isu-isu ini dengan cara

- yang bijak dan adil. Para pemimpin politik harus mampu menjelaskan posisi mereka dengan jelas, meredakan ketegangan, dan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif (Sulaiman, 2013).
- d. Membangun legitimitas pemilu. Legitimitas pemilu sangat penting dalam menjaga stabilitas politik. Komunikasi politik yang transparan dan jujur membantu membangun legitimasi pemilu di mata masyarakat. Ini berarti bahwa hasil pemilu akan lebih mudah diterima, bahkan oleh pihak yang kalah, karena prosesnya dianggap adil dan akuntabel (Nasution, 2012).
  - e. Menyebarkan informasi pemilu. Komunikasi politik juga berperan dalam menyebarkan informasi tentang pemilu. Ini termasuk informasi terkait tanggal pemungutan suara, lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara), peraturan pemilu, dan persyaratan memilih. Informasi yang tepat waktu dan akurat adalah kunci untuk memastikan partisipasi yang maksimal dalam pemilu.
  - f. Meningkatkan transparansi. Komunikasi politik yang transparan dan terbuka membantu mengurangi ketidakpercayaan dalam proses pemilu. Para pemimpin politik dan partai politik harus secara terbuka menyampaikan sumber pendanaan kampanye mereka, program-program politik, dan segala hal yang berhubungan dengan pemilu. Ini membantu meminimalkan spekulasi dan konspirasi yang dapat merusak integritas pemilu (Gazali, 2004).
  - g. Berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi politik juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat menggunakan komunikasi politik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, merespons kebutuhan mereka, dan menjelaskan kebijakan serta keputusan yang diambil dalam konteks pemilu.
  - h. Menyampaikan visi dan misi pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Bima dapat menggunakan komunikasi politik untuk menjelaskan visi dan misi mereka dalam konteks pemilu. Ini melibatkan penjelasan tentang program-program pembangunan, perencanaan, dan proyek-proyek yang akan mereka jalankan jika terpilih kembali. Dengan komunikasi politik yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami rencana pemerintah dan memutuskan apakah mereka sejalan dengan kepentingan mereka.
  - i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Selain mendorong partisipasi memilih, komunikasi politik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pemilu. Pemerintah daerah Kabupaten Bima dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan pemilu, menjadi petugas TPS, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemilu lainnya. Komunikasi politik yang inklusif dan berorientasi pada partisipasi dapat menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan bermartabat.

### 3.2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Pemilu 2024

Pemerintah daerah Kabupaten Bima memiliki peran penting dalam menjaga martabat pemilu dan mendukung proses demokratis. Dalam konteks Pemilu 2024, peran mereka sangat signifikan dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima.

- a. Penyelenggara pemilu yang adil. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pemilu di Kabupaten Bima berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Mereka bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi dan mengelola proses pemilu. Hal ini mencakup persiapan logistik, perencanaan pemungutan suara, dan pengaturan TPS. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pemilih memiliki akses yang mudah ke TPS dan bahwa pemungutan suara berlangsung lancar.

- b. Peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Bima harus memainkan peran aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Mereka dapat mengadakan kampanye pendidikan pemilih, seminar, dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana cara berpartisipasi. Pemerintah daerah juga dapat mendukung inisiatif masyarakat dalam menggalang partisipasi aktif dalam proses pemilu.
- c. Menyediakan informasi yang jelas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi terkait pemilu tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Mereka dapat meluncurkan situs web resmi dan menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi penting seperti tanggal pemungutan suara, lokasi TPS, daftar pemilih, dan persyaratan pemilih. Dengan menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat, pemerintah daerah dapat membantu pemilih dalam mengambil keputusan yang informasional.
- d. Keamanan dan ketertiban. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Ini mencakup pengaturan keamanan di sekitar TPS, pemantauan potensi gangguan keamanan, dan penanganan konflik yang mungkin muncul selama pemilu. Keamanan yang baik adalah prasyarat untuk pemilu yang damai dan bermartabat.
- e. Mempromosikan etika pemilu. Pemerintah daerah harus mempromosikan etika pemilu di antara semua peserta pemilu. Mereka dapat mengeluarkan pedoman etika kampanye yang mengatur perilaku peserta pemilu, melarang praktek-praktek politik yang tidak etis, dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan melakukan ini, pemerintah daerah dapat membantu meminimalkan politik kotor dan kampanye negatif yang dapat merusak martabat pemilu.
- f. Memfasilitasi dialog politik. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog politik antara berbagai pihak, termasuk partai politik, LSM, dan kelompok masyarakat sipil. Dialog politik yang konstruktif dapat membantu mengatasi perbedaan dan konflik politik. Mereka dapat menyelenggarakan forum diskusi dan pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan yang bermartabat.
- g. Menyediakan fasilitas publik untuk kampanye. Pemerintah daerah juga harus menyediakan fasilitas publik yang adil bagi semua peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye mereka. Ini termasuk memberikan izin penggunaan lapangan umum, gedung serbaguna, dan fasilitas lainnya. Dengan memberikan akses yang setara, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan pemilih.
- h. Membangun kerja sama dengan lembaga terkait. Pemerintah daerah Kabupaten Bima harus menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan pemilu berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN

Komunikasi politik adalah alat yang sangat penting dalam menjaga martabat pemilu dan proses demokratis. Pemerintah daerah Kabupaten Bima harus mengakui peran krusial komunikasi politik dalam Pemilu 2024 dan berusaha untuk menerapkannya secara efektif. Dengan menggabungkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendidikan politik, pemilu di Kabupaten Bima dapat berjalan dengan integritas dan memberikan hasil yang mewakili keinginan rakyat. Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten Bima berperan sentral dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, meningkatkan partisipasi masyarakat, menyediakan informasi yang jelas, menjaga keamanan, dan

mempromosikan etika pemilu, mereka dapat memastikan bahwa Pemilu 2024 di Kabupaten Bima berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Dengan upaya yang koordinatif, pemerintah daerah dapat menjadi penggerak utama dalam mendukung pemilu yang bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>
- Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 91–101. <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7014211002154994371612February2019.pdf>
- Arianti, I. (2020). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*.
- Aris, M. S. (2022). Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. *Media Iuris*, 5(3), 473–506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>
- Arrofi, A. A. (2023). ... (JEJARING KELEMBAGAN) DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung). 2024. <http://digilib.unila.ac.id/71171/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/71171/2/3>. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
- Candra, F., & Bariun, L. O. (2022). Efektifitas Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Keadilan*, 13(1), 1–11.
- Dimansyah Arianto. (2021). *Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Asn) (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bima)*.
- Duto, F. P. (2023). STRATEGI PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI MEDIA SOSIAL UNTUK MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung. 2024(1), 20. [http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71228%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/71228/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71228%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/71228/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Gazali, E. (2004). Interaksi Politik dan Media : Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 53–74.
- Kadir, A. (2021). penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada di Kota Bima dan Kabupaten Bima. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 32–46.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat. In *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* (Vol. 3, Issue 2).
- Micoland Manullang, V., & SigitWidiarto, R. (2022). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6852–6858. <https://core.ac.uk/download/pdf/25490079.pdf>
- Nasution, B. (2012). KOMUNIKASI POLITIK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Jurusan Ilmu Komunikasi. *Komunikasi Politik*, 1, 13.
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1),

- 15–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>
- Nusantara, M. F. G. (2020). *STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)*. 2024(July), 1–23.
- Rahmansyah, A., & Irwandi, I. (2021). Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 449–466. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16197>
- Rifky Setya Anugrah, A., Albatroy Jalius, ad, & Naskah, H. (2023). Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 (Studi Kasus Kalimantan Barat). *Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 1(1), 54–72. <https://glorespublication.org/index.php/globalistik>
- Rosidi, R. (2017). Strategi Komunikasi politik dan Budaya Transparasi Partai Politik. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 2(1), 78–100. <https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15>
- S, L. A. (2023). *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW KAMPANYE*. 1(1), 1–12.
- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Public Administration Journal*, 3(2), 9–17.
- Sulaiman, A. I. (2013). Komunikasi Politik Dalam Demokratisasi. *Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 11, 119–132.
- Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163–172. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6>
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Vanly Vily Mumu. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. *Governance*, 1(1), 1–9.
- Wulandari, A. Y., & Widiarti, P. W. (2020). 1125-2302-1-Pb. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3), 201–209.